

Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa

Saryono^{1*}, Alisa Nur Fazria², Sopiah Andini¹, Hasan¹

¹STKIP Kusuma Negara Jakarta, Indonesia

Abstrak—Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang spesifik tentang budaya politik mahasiswa anggota organisasi kemahasiswaan STKIP Kusuma Negara Jakarta. Secara khusus (1)Memperoleh informasi kajian hubungan antara pemahaman Pancasila sebagai etika politik ketatanegaraan Indonesia dengan budaya politik mahasiswa anggota organisasi kemahasiswaan STKIP Kusuma Negara Jakarta. (2) Memperoleh informasi kajian hubungan antara kesadaran hukum sebagai alat rekayasa sosial dengan budaya politik mahasiswa anggota organisasi kemahasiswaan STKIP Kusuma Negara Jakarta. (3) Memperoleh informasi kajian hubungan kausalitas antara pemahaman Pancasila sebagai etika politik dan kesadaran hukum dengan budaya politik mahasiswa anggota organisasi kemahasiswaan STKIP Kusuma Negara Jakarta. Berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa terdapat hubungan antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum dengan Budaya Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan STKIP Kusuma Negara Jakarta. Implikasi dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baka Budaya Politik ORMAWA sangat dipengaruhi oleh Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum mahasiswa anggota ORMAWA itu sendiri. Untuk itu Budaya Politik Mahasiswa Anggota ORMAWA perlu ditingkatkan, dengan cara aktif dalam urusan-urusan bersama, mengorganisasikan diri sendiri pada sebuah kelompok, dan berani menyampaikan aspirasi

Kata kunci:

Budaya Politik,
Etika Politik,
Kesadaran Hukum,
Organisasi Mahasiswa,

Histori:

Dikirim: 26 Januari 2022
Direvisi: 26 Februari 2022
Diterima: 26 Februari 2022
Online: 28 Februari 2022

©2022 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 193-200.

PENDAHULUAN

Lembaga kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan (ormawa) adalah wadah pelaksanaan kegiatan mahasiswa di kampus. Organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Keberadaan ormawa merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawan, integritas kepribadian, menanamkan sikap ilmiah, dan pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan (Cahyorinartri, N., 2018).

^{1*}Corresponding author.

E-mail: saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id

Peran mahasiswa melalui wadah ormawa tidak hanya terbatas dalam bidang akademik atau profesionalitas keilmuan saja. Mahasiswa melalui wadah ormawa juga berperan sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan bermasyarakat dan bernegara. Dengan kata lain, mahasiswa melalui wadah ormawa baik intra maupun ekstra kampus merupakan kekuatan politik tersendiri yang selalu diperhitungkan dalam sejarah kehidupan masyarakat bernegara. Namun demikian, orientasi perjuangan dan dinamisasi kehidupan ormawa hendaknya tetap pada netralitas lembaga yang sangat menjunjung tinggi moralitas akademis. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran Dirjen Dikti tahun 2002 bahwa sistem penyelenggaraan kegiatan ormawa tidak boleh menjadi perpanjangan tangan (underbow) dari kekuatan partai politik tertentu dan netral terhadap suku, ras, agama dan aliran (golongan) kepercayaan atau SARA (MAJID, A., 2016).

Gerakan mahasiswa yang diharapkan dapat memberi pengaruh besar pada tatanan sosial dan politik dalam perkembangannya belum menunjukkan hasil yang berarti, gerakan mahasiswa masih jauh dari nilai-nilai idealisme bahkan terkesan terpecah belah dengan banyak dibentuknya organisasi-organisasi underbouw dari elit politik yang notabene adalah perpanjangan tangan dari partai politik yang sedang berkuasa. Organisasi intra maupun ekstra kampus seringkali masih dilandasi kepentingan yang ada di luar dari kepentingan mahasiswa, karena sering kali lebih menyuarakan aspirasi kelompok, ideologi tertentu, bahkan bernuansa kepentingan partai politik dan elit politik tertentu. Adapun gerakan organisasi bentukan intra kampus cenderung diinfiltrasi oleh kepentingan organisasi ekstra yang memunculkan konflik antar mahasiswa dalam merebutkan kader. Proses ini mudah terlihat ketika terjadi pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Ketua Himpunan Mahasiswa (HIMA), Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan sebagainya dimana cenderung konflik yang dipengaruhi kepentingan kelompok menjadi tema penting diantara mahasiswa.

Politik selalu menyangkut tujuan – tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan. Bilamana lingkup pengertian politik dipahami seperti itu maka terdapat suatu kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktualisasi berpoltik, karena tidak melibatkan aspek rakyat yang baik sebagai individu maupun sebagai suatu lembaga yang terdapat dalam masyarakat. Pancasila menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara, lewat nilai, moral, norma dan etika yang ditanamkan sebagai bagian dari landasan filosofis serta kepribadian bangsa dan negara. Dengan begitu, ditemukan kesesuaian nilai kepribadian tersebut dengan wilayah birokrasi pada ranah governance, sekaligus “penjaga” regulasi pada level etika bernegara-berbangsa.

Ada dua aspek yang muncul ketika menempatkan Pancasila sebagai etika. Pertama, dari sisi personal, sebagai etika Pancasila menginspirasi setiap orang Indonesia dalam berperilaku di masyarakat. Kedua, dari sisi sosial, Pancasila sebagai etika berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan dalam pengelolaan negara dalam segala bidang seperti bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik serta pengembangan iptek.

Kondisi organisasi mahasiswa STKIP Kusuma Negara adalah lemahnya monitoring kinerja dan pendampingan oleh bidang kemahasiswaan non

akademik. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Program Studi yang seharusnya sebagai badan independent mahasiswa dibawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masih sangat didominasi oleh Bidang Akademik Program Studi. Sehingga membuat HIMA layaknya OSIS pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang hanya menjalankan program-program sekolah tanpa memiliki keberanian untuk lebih mandiri, kreatif dan inovatif. Hal tersebut mengakibatkan sikap saling curiga dan persaingan yang negatif antar anggota HIMA Lintas Prodi. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa (AD/ART KEMA) yang seharusnya menjadi dasar hukum atau landasan dalam berorganisasi tidak dipahami dan digunakan sebagaimana mestinya, mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum dalam berorganisasi. Hal tersebut tentu pada akhirnya sangat mempengaruhi budaya politik organisasi mahasiswa di STKIP Kusuma Negara.

Albert Widjaja menyatakan bahwa budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari : ide, pengetahuan, adat-istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain (Widjaja, A., 1988). Sedangkan Rusadi Sumintapura menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (Aqimis & dkk, 2020).

Alfian, menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial – budaya masyarakat dalam arti luas. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang di pengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama (Hidayat, E., 2020). Alfian, nampaknya menempatkan faktor lingkungan budaya sebagai salah satu faktor penentu orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya. Lain halnya dengan Mar'at, yang menetapkan bahwa sikap suatu kecenderungan berperilaku adalah produk dari suatu proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh faktor budaya. Proses pembentukan sikap politik yang pada gilirannya berupa kehampaan budaya. Boleh jadi, budaya politik adalah pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti situasi lingkungan maupun faktor internal seperti ; kebutuhan , SINA (Sistem Nilai dan Asumsi) dan SKSM (Sistem Koordinasi Senso Motorik) yang orientasinya berkisar pada situasi kehidupan politik yang sedang berlaku bagaimana tujuan-tujuan yang didambakan oleh sistem politik itu sendiri, serta harapan-harapan politik apa dimilikinya, biasanya akan bercampur baur dengan prestasi di bidang peradaban (Chandra, A. I., & Munthe, A.G)

Tindakan dan perilaku politik individu ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik. Segala bentuk ucapan, pernyataan, tingkah laku, bahkan mitos dan legenda sekalipun sebenarnya dapat diungkapkan sebagai akibat pola dan budaya politik. Dengan demikian segala tingkah laku seseorang atau aktor politik merupakan parameter dalam melihat bagaimana sikap dengan siapa individu itu bergaul/berkumpul. Aktor-aktor politik menurut Ramlan dapat dibedakan menjadi dua, yakni : aktor bertipe

pemimpin yang mempunyai tanggungjawab atau tugas dan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedang aktor yang kedua warga negara biasa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan dukungan terhadap aktor politik tipe pertama, termasuk mengajukan aspirasi dan kepentingan atau mengajukan alternatif keputusan yang berlainan dengan keputusan yang telah dibuat oleh aktor politik tipe pertama.

Selanjutnya, masalah yang muncul adalah bagaimana perilaku politik itu berlangsung dalam konteks budaya politik, karena kedua tipe aktor itupun tidak bisa lepas dari pengaruh budaya politik. Bagaimana mereka menyusun rancangan keputusan politik, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan serta mengevaluasi hasil keputusan politik. Kesemuanya itu tidak terlepas dari pengaruh budaya politik seperti norma-norma, tata nilai, sub-budaya, tradisi dan sebagainya. Kesemuanya itu dalam prosesnya dipengaruhi oleh budaya politik beserta karakteristiknya. Agak berbeda dengan perilaku aktor politik warga negara biasa, lazimnya mereka menyampaikan ketidakpuasan, kritik, berusaha merebut posisi politik, mencegah agar keputusannya tidak dilaksanakan, mencegah agar individu atau kelompok tidak menjadi mengambil keputusan, melaksanakan keputusan politik, memilih wakil-wakil rakyat, kampanye dan sebagainya, tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya politik. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh tipe budaya politik, struktur politik dan sistem politik yang merupakan variabel penting dalam mempengaruhi tindakan para aktor politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kampus STKIP Kusuma Negara, yang berada di lingkungan komplek Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman Jl. Raya Bogor KM-24 Cijantung Jakarta Timur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara pemahaman pancasila sebagai etika politik dan kesadaran hukum dengan budaya politik organisasi kemahasiswaan.

Pendekatan yang dikembangkan pada penelitian ini adalah pendekatan eksplantif kuantitatif. Eksplantif, karena tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana korelasi antar dua atau lebih variabel baik pola, arah, sifat, bentuk maupun kekuatannya, karenanya disebut juga sebagai penelitian korelasional. Kuantitatif, karena data yang diperlukan untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut berbentuk angka (data numerik) hasil pengukuran dengan menggunakan metode uji statistik.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari penyusunan proposal penelitian pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan April 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) STKIP Kusuma Negara Jakarta, yang terdiri 9 badan organisasi dengan anggota kepengurusan tahun 2020-2021 sejumlah 396. Teknik pengambilan sampel yaitu Teknik proportional random sampling. Setiap badan organisasi mahasiswa diambil sampel 6-13 mahasiswa secara acak (random) sehingga memenuhi sampel yang dibutuhkan yakni sebanyak 80 mahasiswa. Terdapat dua instrument yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tes dan kuesioner (angket) yang telah diuji validitas dan realibitas sebelumnya. Uji validitas terhadap kedua instrument menggunakan rumus korelasi product moment. Uji realibitas instrument tes menggunakan rumus K-R 20, sedangkan uji

reabilitas instrument angket menggunakan rumus Alpha. Data diperoleh dari tes dan kuesioner (angket) yang telah diisi oleh responden. Sebelum dilakukan analisis maka terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas sampel menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov dan uji linieritas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Teknik korelasi product moment.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil penelitian yang disajikan peneliti mengenai Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa di STKIP Kusuma Negara Jakarta.

1. Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dengan Budaya Politik

Pemahaman etika politik adalah kemampuan mahasiswa untuk dapat menginterpretasikan, membandingkan, menjelaskan dan memeberikan contoh tentang penghayatan pada nilai-nilai religius, pengakuan terhadap asas kesamaan dan kebebasan manusia, kesamaan hak dan kesempatan bagi seluruh rakyat, dan mengedepankan norma sopan santun dalam keseharian. Dengan indikator penghayatan pada nilai-nilai religius, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat, penjaminan tidak adanya tirani minoritas dan dominasi mayoritas, kesamaan hak dan kesempatan bagi seluruh rakyat, dan mengedepankan norma sopan santun dalam keseharian.

Sedangkan budaya politik adalah keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum. Adapun indikator yang dapat dijadikan tolok ukur adalah memiliki keinginan hidup teratur, taat terhadap aturan, menjunjung rasa kemanusiaan, dan memiliki rasa intropeksi diri yang tinggi. Bila pemahaman pancasila sebagai etika politik ditingkatkan maka budaya politik akan mengikuti, semakin baik pemahaman pancasila sebagai etika politik maka akan semakin baik budaya politiknya.

Setelah dilakukan penelitian terhadap anggota organisasi kemahasiswaan STKIP Kusuma Negara Jakarta berdasarkan hasil analisis *koefisien regresi* pengaruh variable independent variable Etika Politik (X^1) terhadap Budaya Politik (Y) didapati besarnya *koefisien regresi* 1,329, maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan variable Pemahaman Etika Politik (X^1) sebesar satu satuan maka variable Budaya Politik (Y) akan meningkat sebesar 1,329. Uji parsial menunjukkan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa secara parsial Pemahaman Etika Politik (X^1) berpengaruh signifikan terhadap Budaya Politik (Y).

Tabel 1. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	53.876	3.544		15.201	.000
Pemahaman Etika Politik	1.329	.074	.812	17.866	.000
Kesadaran Hukum	.159	.044	.171	3.635	.000

a. Dependent Variable: Budaya Politik

Sumber: Data Primer Diolah

2. Hubungan Antara Kesadaran Hukum dengan Budaya Politik

Kesadaran hukum adalah keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum. Adapun indikator yang dapat dijadikan tolok ukur adalah memiliki keinginan hidup teratur, taat terhadap aturan, menjunjung rasa kemanusiaan, dan memiliki rasa intropeksi diri yang tinggi.

Sedangkan budaya politik adalah suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Adapun indikator dari budaya politik adalah aktif dalam urusan-urusan bersama, mengorganisasikan diri pada sebuah kelompok, dan berani menyampaikan aspirasi. Bila kesadaran hukum ditingkatkan maka akan diikuti oleh budaya politik, semakin baik kesadaran hukum maka akan semakin baik budaya politiknya.

Hasil analisis *koefisien regresi* pengaruh variable *independent variable* Kesadaran Hukum (X2) terhadap Budaya Politik didapatkan *koefisien regresi* 0,159 yang dapat diartikan bahwa setiap perubahan variable Kesadaran Hukum (X2) sebesar satu satuan maka variable Budaya Politik (Y) akan meningkan sebesar 0,159. Uji parsial menunjukkan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa secara parsial Kesadaran Hukum (X2) berpengaruh signifikan terhadap Budaya Politik (Y).

Tabel 2. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	53.876	3.544		15.201	.000
Pemahaman Etika Politik	1.329	.074	.812	17.866	.000
Kesadaran Hukum	.159	.044	.171	3.635	.000

a. Dependent Variable: Budaya Politik

Sumber: Data Primer Diolah

3. Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum dengan Budaya Politik

Pemahaman etika politik adalah kemampuan mahasiswa untuk dapat menginterpretasikan, membandingkan, menjelaskan dan memberikan contoh tentang penghayatan pada nilai-nilai religius, pengakuan terhadap asas kesamaan dan kebebasan manusia, kesamaan hak dan kesempatan bagi seluruh rakyat, dan mengedepankan norma sopan santun dalam keseharian. Dengan indikator pengjayatan pada nilai-nilai religius, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat, penjaminan tidak adanya tirani minoritas dan dominasi mayoritas, kesamaan hak dan kesempatan bagi seluruh rakyat, dan mengedepankan norma sopan santun dalam keseharian.

Kesadaran hukum adalah keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum. Adapun indikator yang dapat dijadikan tolok ukur adalah memiliki keinginan hidup teratur, taat terhadap aturan, menjunjung rasa kemanusiaan, dan memiliki rasa intropeksi diri yang tinggi.

Sedangkan budaya politik merupakan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Adapun indikator dari budaya politik adalah aktif dalam urusan-urusan bersama, mengorganisasikan diri pada sebuah kelompok, dan berani menyampaikan aspirasi. Bila pemahaman etika politik dan kesadaran hukum ditingkatkan maka budaya politik akan mengikuti, semakin baik pemahaman Pancasila sebagai etika politik dan kesadaran hukum maka akan semakin baik budaya politiknya.

Berdasarkan hasil penghitungan diketahui bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R), yaitu korelasi antara Pemahaman Etika Politik (X¹) dan Kesadaran Hukum (X²) terhadap Budaya Politik (Y) sebesar 0,926. Hal ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat.

Nilai koefisien determinasi berganda (*Adjusted R Square*) adalah 0,855 atau 85,5% yang berarti nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 85,5% Budaya Politik (Y) dipengaruhi oleh Pemahaman Etika Politik (X¹), dan Kesadaran Hukum (X²), sedangkan sisanya 14,5% dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian.

Hasil uji hipotesis, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum dengan Budaya Politik. Menunjukkan bahwa Pemahaman Etika Politik (X¹), dan Kesadaran Hukum (X²) secara serentak atau Bersama-sama berpengaruh terhadap Budaya Politik (Y).

Tabel 3. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	<i>Std. Error Of the Estimate</i>	Durbin-Watson
1	.926	.858	.855	4.07870	1.863

- a. Predictors : (Constant), Kesadaran Hukum, Pemahaman Etika Politik
 b. Dependent Variable: Budaya Politik

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa terdapat hubungan antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum dengan Budaya Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan STKIP Kusuma Negara Jakarta. Implikasi dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Budaya Politik ORMAWA sangat dipengaruhi oleh Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum mahasiswa anggota ORMAWA itu sendiri. Untuk itu Budaya Politik Mahasiswa Anggota ORMAWA perlu ditingkatkan, dengan cara aktif dalam urusan-urusan bersama, mengorganisasikan diri sendiri pada sebuah kelompok, dan berani menyampaikan aspirasi. Hal ini dapat dilakukan oleh Anggota ORMAWA sendiri juga Kasi Organisasi Kemahasiswaan melalui pembinaan,

REFERENSI

- Widjaja, A. (1988). Budaya politik dan pembangunan ekonomi.
- Hidayat, E. (2020). *Oligarki Dalam Kekuasaan Di Pilkades*. Airlangga University Press.
- Aqimis, S., Pebriyenni, P., & Bambang, T. (2020). *Budaya Politik Masyarakat Jorong Pulau Panjang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Chandra, A. I., & Munthe, A. G. Profil Sikap terhadap Pluralisme: Perspektif Mahasiswa Atas Kehidupan Kampus dalam Konteks Nasional dan Global (Studi Kasus di Stai & Unai). *Research Reports in the Humanities and Social Sciences*, 2, 12746.
- Cahyorinartri, N. (2018). Motivasi Mahasiswa Berorganisasi di Kampus. *Jurnal Psikologi Insight*, 2(2), 27-38.
- MAJID, A. (2016). *Peranan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dalam Penguatan Karakter Kepemimpinan Mahasiswa (Studi Deskriptif Pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).